

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA MANADO TAHUN 2011-2016**

*ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE
IN THE GOVERNMENT OF MANADO CITY FROM 2011-2016*

Oleh:

**Marina F. Pandjaitan¹
Parengkuan Tommy²
Victoria N. Untu³**

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

¹marinapanjaitan35@gmail.com

²tparengkuan197@gmail.com

³Neisye@unsrat.ac.id

Abstrak: Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam otonomi daerah karena keuangan daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam mengurus pemerintahan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kinerja keuangan daerah pemerintah kota Manado tahun 2011-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah kota Manado tahun 2011-2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata derajat desentralisasi masih sangat rendah, rasio ketergantungan keuangan daerah masih tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah rendah dengan pola konsultatif, rasio belanja operasi terhadap total belanja mendominasi alokasi belanja dibandingkan rasio belanja modal terhadap total belanja dan rasio efisiensi belanja kurang efisien. Saran untuk penelitian ini yaitu dengan melakukan monitoring dan pengawasan misalnya dengan adanya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Pelayanan Publik untuk masyarakat. Hal lainnya agar pemerintah dapat mengurangi belanja tidak langsung, khususnya belanja pegawai, memaksimalkan alokasi belanja modal agar untuk infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta memperkecil kesenjangan antar daerah dan kelompok masyarakat.

Kata Kunci: kinerja keuangan, rasio keuangan daerah

Abstract: Regional finance has a very important role in regional autonomy because regional finance reflects the ability of regions in governing the government. One tool to analyze the performance of local governments in managing their regional finances is to carry out a ratio analysis to the APBD that has been established and implemented. The purpose of this research is to see the financial performance of Manado city government in 2011-2016. The data used in this study is Budget Realization Report (LRA) Income and Expenditure Manado city year 2011-2016. The research method used in this search is descriptive. The results show that the average degree of decentralization is still very low, the ratio of regional financial dependence is still high, the ratio of regional financial independence is low with the consultative pattern, the ratio of operational expenditure to total expenditure dominates the expenditure allocation compared to the ratio of capital expenditure to total spending and the ratio of less spending efficiency efficient. Suggestion for this research is by monitoring and supervision for example by existence of Law of Public Information and Public Service Law for society. Other matters are for the government to reduce indirect spending, particularly personnel expenditure, maximize the allocation of capital expenditures for infrastructure, promote sustainable economic growth, reduce unemployment and poverty and minimize disparities between regions and communities.

Keywords: financial performance, local financial ratio

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berakhirnya kekuasaan orde baru pada tahun 1998 menyebabkan banyak perubahan yang terjadi di pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan yang awalnya bersifat terpusat mulai mengalami desentralisasi. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Peraturan tersebut menjadi landasan bagi pemberian otonomi daerah yang semakin besar kepada daerah. Pemerintah Daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu (Halachmi, 2005) disini pemerintah daerah juga diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Berhasilnya otonomi daerah dapat dilihat dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pendapatan Asli Daerah dan hasil pengelolaan keuangan daerah lainnya harus diupayakan secara optimal karena pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk membiayai pelayanan dan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Manado tahun 2011-2016 berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan, Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian (Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal) dan Rasio Efisiensi Belanja.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam otonomi daerah karena keuangan daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam mengurus pemerintahan (Mamesah dalam Halim, 2001:19).

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Rondonuwu, 2015).

Untuk mengukur kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan:

1. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan.

Berikut adalah tabel Kategori Tingkat Desentralisasi Keuangan Daerah:

Tabel 1. Kategori Tingkat Desentralisasi Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan	Desentralisasi keuangan
Sangat rendah	0%-25%
Rendah	> 25%-50%
Sedang	> 50%-75%
Tinggi (mandiri)	> 75%-100%

Sumber: Nataludin (2001)

2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan keuangan daerah yaitu rasio yang mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi.

Tabel 2. Kategori Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan	Ketergantungan (%)
Sangat rendah	0%-25%
Rendah	> 25%-50%
Sedang	> 50%-75%
Tinggi (ketergantungan)	> 75%-100%

Sumber: Dwiranda (2007)

3. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian adalah tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Tabel 3. Kategori Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim (2007)

Keterangan pola hubungan rasio kemandirian

- 1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

4. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasi berarti persentase Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

5. Rasio Efisiensi Belanja

Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

Tabel 4. Kategori Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Efisiensi (%)
Tidak efisien	> 100%
Kurang efisien	90% - 100%
Cukup efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat efisien	< 60%

Sumber: Halim (2007)

Penelitian Terdahulu

Karlina dan Handayani (2017) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015. Bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah pemerintah kota Surabaya periode 2012-2015 dan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran belanja daerah pemerintah kota Surabaya periode 2012-2015. Metode Penelitian Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Surabaya secara umum dikatakan Kurang baik dalam varians pendapatan.

Kusumadewi dan Ilat (2016) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014. Bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam pengelolaan APBD tahun anggaran 2012 sampai 2014. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukan kinerja pemerintah dalam mengelola pendapatannya dikatakan baik ini dibuktikan dari varians pendapatan yang menunjukan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatannya melebihi dari yang telah dianggarkan.

Rahmawati dan Putra (2016) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. Bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada Tahun Anggaran 2010-2012 tergolong kurang baik.

Mokodompit, Pangemanan dan Elim (2014) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. Bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah kota Kotamobagu. Metode Penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu tergolong kurang baik.

Daling (2013) dengan judul Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Bertujuan untuk mengetahui kinerja realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode Penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendapatan belum efektif hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah yang terealisasi dengan yang telah dianggarkan. Sedangkan untuk kinerja belanja sudah efektif hal ini dapat dilihat dari kecilnya anggaran belanja yang terealisasi dari yang telah dianggarkan.

METODE PENELITIAN

Pendekataan Penelitian

Data penelitian merupakan data yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang ilmiah dan sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya (Sugiyono, 2013). Analisis kuantitatif digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat pengukuran kuantitas (jumlah dan angka).

Populasi, Besaran Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah data keuangan daerah Kota Manado akan diamati selama

6 tahun yaitu tahun 2011-2016. Sehingga jumlah pengamatan sebesar 6 pengamatan, yaitu 6 tahun laporan keuangan.

Data dan Sumber Data

Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh secara resmi dari Kantor Walikota Manado tepatnya di BPKAD (Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah kota Manado tahun 2011-2016 dan Badan Pusat Statistik Kota Manado.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Metode Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian.

Teknik Analisis

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan dari berbagai sumber, yang berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kinerja Keuangan Daerah menggunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang antara lain: Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan, Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian dan Rasio Efisiensi Belanja. Untuk mengukur kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan:

1. Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 5. Derajat Desentralisasi Kota Manado Tahun 2011-2016

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Derajat Desentralisasi (%)
2011	134,721,720,942.00	899,152,955,866.00	14,98 %
2012	178,307,223,102.00	1,037,498,574,726.00	17,18 %
2013	215,871,042,643.00	1,204,927,489,606.00	17,91 %
2014	263,392,316,992.00	1,330,515,594,943.00	19,79 %
2015	289,462,741,463.00	1,726,971,962,034.00	16,76 %
2016	345,215,373,491.00	1,669,185,651,834.00	20,68 %
Rata-rata	237,828,403,105.50	1,311,375,371,502.00	17,88 %

Sumber : Hasil Olahan Data

Persentase tingkat derajat desentralisasi terkecil terdapat pada tahun 2014 yaitu 14,98 % sedangkan persentase tingkat derajat desentralisasi terbesar terdapat pada tahun 2016 yaitu 20,68 %. Apabila dilihat dari tahun 2011-2016, rata-rata derajat desentralisasi yaitu 17,88 %. Derajat desentralisasi keuangan pemerintah Kota Manado masuk dalam kategori sangat rendah.

2. Rasio Ketergantungan

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 6. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Manado Tahun 2011-2016

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (%)
2011	764,431,234,924.00	899,152,955,866.00	85,01 %
2012	859,191,351,624.00	1,037,498,574,726.00	82,81 %
2013	988,856,446,963.00	1,204,927,489,606.00	79,99 %
2014	1,064,278,393,926.00	1,330,515,594,943.00	79,98 %
2015	1,224,205,220,571.00	1,726,971,962,034.00	70,88 %
2016	1,207,787,111,200.00	1,669,185,651,834.00	72,35 %
Rata-rata	1,018,124,959,868	1,311,375,371,502	78,85 %

Sumber : Hasil Olahan Data

Persentase tingkat rasio ketergantungan terkecil terdapat pada tahun 2015 yaitu 70,88 % sedangkan persentase tingkat rasio ketergantungan terbesar terdapat pada tahun 2011 yaitu 85,01 %. Apabila dilihat dari tahun 2011-2016, rata-rata rasio ketergantungan yaitu 78,85 %. Rasio ketergantungan keuangan pemerintah Kota Manado masuk dalam kategori sedang.

3. Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 7. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Manado Tahun 2011-2016

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)
2011	134,721,720,942.00	764,431,234,924.00	17,62 %
2012	178,307,223,102.00	859,191,351,624.00	20,75 %
2013	215,871,042,643.00	988,856,446,963.00	21,83 %
2014	263,392,316,992.00	1,064,278,393,926.00	24,74 %
2015	289,462,741,463.00	1,224,205,220,571.00	23,64 %
2016	345,215,373,491.00	1,207,787,111,200.00	28,58 %

Rata-rata	237,828,403,105.50	1,018,124,959,868.00	22,86 %
-----------	--------------------	----------------------	---------

Sumber : Hasil Olahan Data

Persentase tingkat rasio kemandirian terkecil terdapat pada tahun 2011 yaitu 17,62 % sedangkan persentase tingkat rasio kemandirian terbesar terdapat pada tahun 2016 yaitu 28,58 %. Apabila dilihat dari tahun 2011-2016, rata-rata rasio kemandirian yaitu 21,86 % dengan pola hubungan yaitu pola instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan jauh dibandingkan pemerintah daerah itu sendiri.

4. Rasio Keserasian

a. Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 8. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Kota Manado Tahun 2011-2016

Tahun	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja (%)
2011	710,716,513,878.00	876,626,500,966.00	81,07 %
2012	767,255,675,173.00	929,713,979,980.00	82,52 %
2013	895,456,640,740.00	1,087,436,304,582.00	82,34 %
2014	1,071,992,101,162.00	1,283,771,876,534.00	83,50%
2015	1,198,874,099,432.00	1,478,093,264,159.00	81,10%
2016	1,410,837,303,382.00	1,811,310,517,797.00	77,89%
Rata-rata	1,009,188,722,294.50	1,244,492,074,003.00	81,40 %

Sumber : Hasil Olahan Data

Persentase tingkat rasio belanja operasi terhadap total belanja terkecil terdapat pada tahun 2011 yaitu 81,07 % sedangkan persentase tingkat rasio belanja operasi terhadap total belanja terbesar terdapat pada tahun 2014 yaitu 83,50 %. Apabila dilihat dari tahun 2011-2016, dengan rata-rata rasio belanja operasi terhadap total belanja yaitu 81,40 %.

b. Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 9. Rasio Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Kota Manado Tahun 2011-2016

Tahun	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja (%)
2011	165,582,485,093.00	876,626,500,966.00	18,88 %
2012	162,297,276,287.00	929,713,979,980.00	17,45 %
2013	191,297,563,842.00	1,087,436,304,582.00	17,59 %
2014	208,880,230,185.00	1,283,771,876,534.00	16,27 %
2015	277,789,614,727.00	1,478,093,264,159.00	18,79 %
2016	399,836,332,915.00	1,811,310,517,797.00	22,07 %
Rata-rata	234,280,583,841.50	1,811,310,517,797.00	18,51 %

Sumber : Hasil Olahan Data

Persentase tingkat rasio belanja modal terhadap total belanja terkecil terdapat pada tahun 2014 yaitu 16,27 %, Rasio ini mengalami penurunan dari tahun 2011-2012 dan kembali meningkat di tahun 2013 namun kembali

menurun di tahun 2014 dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2016 dengan persentase tingkat rasio belanja modal terhadap total belanja yaitu 22,07 %. Apabila dilihat dari tahun 2011-2016, dengan rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja yaitu 18,51 %.

5. Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 10. Rasio Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Kota Manado Tahun 2011-2016

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi Belanja (%)
2011	876,626,500,966.00	931,667,619,397.00	94,09 %
2012	929,713,979,980.00	1,020,356,810,944.00	91,11 %
2013	1,087,436,304,582.00	1,286,788,237,248.00	84,50 %
2014	1,283,771,876,534.00	1,556,843,767,527.94	82,45%
2015	1,478,093,264,159.00	1,960,743,637,152.00	75,38%
2016	1,811,310,517,797.00	2,011,394,542,984.00	90,05%
Rata-rata	1,244,492,074,003.00	1,461,299,102,542.16	86,26 %

Sumber : Hasil Olahan Data

Persentase tingkat rasio efisiensi belanja terkecil terdapat pada tahun 2015 yaitu 75,38 % sedangkan persentase tingkat rasio efisiensi belanja terbesar terdapat pada tahun 2011 yaitu 94,09 %. Persentase tingkat rasio efisiensi belanja sempat mengalami penurunan dari tahun 2011-2015 namun kembali meningkat drastis di tahun 2016. Apabila dilihat dari tahun 2011-2016, dengan rata-rata rasio efisiensi belanja yaitu 82,62 %.

Pembahasan

Data yang dikumpulkan berupa arsip dokumen pada bagian BPKAD yang berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun 2011-2016.

1. Derajat Desentralisasi
Pemerintah daerah Kota Manado termasuk mampu menyelenggarakan desentralisasi karena nilai rata-rata yang masih dalam kategori sangat rendah (skala 0%-25%). Artinya pemerintah daerah Kota Manado belum mampu menyelenggarakan desentralisasi dengan mengoptimalkan potensi daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum yang lebih baik.
2. Rasio Ketergantungan
Pemerintah daerah Kota Manado memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemberian dana dari pemerintah pusat (skala 75%-100%). Tingginya ketergantungan pemerintah daerah ini disebabkan masih rendahnya kontribusi PAD dibandingkan pendapatan transfer.
3. Rasio Kemandirian
Tingkat kemandirian keuangan daerah merepresentasikan Kinerja Keuangan daerah yang dari hasil perhitungan masih kurang dengan pola hubungan Instruktif untuk tahun 2011-2015 (skala 0%-25%) dan pola hubungan konsultatif untuk tahun 2016 (skala 26-50%), yang berarti peranan pemerintah pusat masih lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak dapat melaksanakan otonomi daerah secara finansial). Pemerintah daerah belum cukup mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Rasio Keserasian
 - a. Rasio Belanja Operasi
Artinya porsi belanja operasi pada pemerintah daerah Kota Manado cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh besarnya belanja pegawai karena penambahan jumlah pegawai negeri sipil dan dinas-dinas terbaru.
 - b. Rasio Belanja Modal

Porsi belanja operasi pada pemerintah daerah Kota Manado cukup kecil. Pemerintah juga memiliki upaya untuk terus mengupayakan pembangunan atau investasi modal jangka panjang di daerahnya, meski biaya alokasi belanja lebih dominan dari belanja operasi.

5. Rasio Efisiensi Belanja

Pemerintah daerah Kota Manado sempat mengalami tingkat efisiensi belanja yang kurang efisien pada tahun 2011 dan 2012, kemudian mengganti status menjadi cukup efisien selama 3 tahun (tingkat efisiensi belanja semakin baik) yaitu pada tahun 2013-2015 (skala 80%-90%). Namun pada tahun 2016, kriteria efisiensi kembali mengalami tingkat efisiensi belanja yang kurang efisien seperti di tahun 2011 dan 2012 (skala 90%-100%). Hal itu terjadi karena realisasi pendapatannya lebih besar daripada realisasi belanja daerah. Artinya total belanja melebihi total pendapatan daerah. Pemerintah daerah Kota Manado belum bisa memperhitungkan biaya yang perlu dikeluarkan untuk memperoleh pajak daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Kinerja keuangan daerah pemerintah kota Manado tahun 2011-2016 berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi, mengalami kenaikan derajat desentralisasi. Artinya pemerintah daerah kota Manado belum baik dalam menyelenggarakan pelayanan umum.
2. Kinerja keuangan daerah pemerintah kota Manado tahun 2011-2016 berdasarkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, mengalami tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dari pemerintah pusat dalam pemberian dana (transfer).
3. Kinerja keuangan daerah pemerintah kota Manado tahun 2011-2016 berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, mengalami tingkat kemandirian yang kurang. Peranan pemerintah lebih dominan dari pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah belum mampu membiayai kebutuhan dan kegiatan daerahnya.
4. Kinerja keuangan daerah pemerintah kota Manado tahun 2011-2016 berdasarkan Rasio Keserasian yaitu Rasio Belanja Operasi Keuangan Daerah, mengalami porsi belanja operasi yang cukup tinggi disebabkan oleh besarnya belanja pegawai karena penambahan jumlah pegawai negeri sipil dan dinas-dinas terbaru. Untuk Rasio Belanja Modal Keuangan Daerah, porsi belanja operasi pada pemerintah daerah cukup kecil dan dapat dikatakan pemerintah daerah Kota Manado masih kurang memperhatikan pembangunan-pembangunan di daerah.
5. Kinerja keuangan daerah pemerintah kota Manado tahun 2011-2016 berdasarkan Rasio Keserasian yaitu Rasio Belanja Modal Keuangan Daerah, mengalami penurunan dan porsi belanja modal yang cukup kecil.
6. Kinerja keuangan daerah pemerintah daerah kota Manado tahun 2011-2016 berdasarkan Rasio Efisiensi Belanja Keuangan Daerah, mengalami naik turun tidak menetap dalam setiap tahunnya. Nilai efisiensi yang besar membuat pemerintah daerah kota Manado belum bisa memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Peran masyarakat penting dalam melakukan monitoring dan pengawasan misalnya dengan adanya undang-undang yang menjelaskan dimana masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Pelayanan Publik, masyarakat bisa mencari tahu anggaran apa saja yang disediakan pemerintah untuk pembelanjaan daerah sehingga dapat mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan bila tak kunjung dilaksanakan.
2. Hal lainnya agar pemerintah dapat mengurangi belanja tidak langsung, khususnya belanja pegawai. Begitu juga untuk alokasi belanja modal agar dapat dimaksimalkan untuk infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta memperkecil kesenjangan antar daerah dan kelompok masyarakat.
3. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, bisa diganti atau ditambah dengan Rasio Efektivitas Pajak Daerah, Rasio Efisiensi Pajak Daerah, Rasio Pertumbuhan (Pertumbuhan Pendapatan dan Pertumbuhan Belanja).

DAFTAR PUSTAKA

- Aluy, C. A., Tulung, Joy Elly, & Tasik, H. H. 2017. Pengaruh Keberadaan Wanita Dalam Manajemen Puncak Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Pada Bank Bumn dan Bank Swasta Nasional Devisa di Indonesia). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/15997>
- Bansaleng, R. D., Tommy, P., & Saerang, I. S. 2014. Kebijakan Hutang, Struktur Kepemilikan dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Food and Beverage di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(3).
- Daling, M. 2013. Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal EMBA. Universitas Sam Ratulangi. Manado.* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1942>. Diakses: 9 Februari 2018.
- Dwirandra. 2007. *Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002-2006*. Skripsi. Bali: Univerisitas Udayana.
- Halachmi, A. 2005. Performance Measurementis only one Way of Managing Performance. *International Journal of Productivity and Performance Management*. 54, 502-516. <https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/17410400510622197>. Diakses: 14 Maret 2108.
- Halim, A., dan Damayanti, T. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Halim, A. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Karlina, A., dan Handayani. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya. <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/download/2867/2473>. Diakses: 12 Februari 2018.
- Kusumadewi, W. N., dan Ilat V. 2016. Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014. *Jurnal EMBA. Universitas Sam Ratulangi. Manado.* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11766/11359>. Diakses: 8 Februari 2018.
- Mokodompit, P. S., Pangemanan, S. S., dan Elim, I 2014. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA. Universitas Sam Ratulangi. Manado.* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4914>. Diakses: 17 Februari 2018.
- Nataluddin. 2001. *Potensi dana perimbangan daerah pada pemerintah daerah di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah*. UPP YKPN, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-undang No 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Rahmawati, Ni. E. & Putra, I W. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Universitas Udayana. Bali. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/17858>. Diakses: 12 Februari 2018.
- Rondonuwu H. R. 2015. Analisi Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA* 23. Universitas Sam Ratulangi. Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7704/6346>. Diakses: 16 Maret 2018.

Setyaningrum., D., dan Syafitri, F. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Volume 9, No.2 Tahun 2012. <https://jaki.ui.ac.id/index.php/home/article/download/138/138>. Diakses: 14 Maret 2018.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. CV Alfabeta, Bandung.

Tommy, P., & Saerang, I. S. 2014. Struktur Modal, Ukuran Perusahaan Dan Risiko Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2).

Tulung, Joy Elly and Ramdani, Dendi. 2016. "The Influence of Top Management Team Characteristics on BPD Performance". *International Research Journal of Business Studies*, Volume 8 Nomor 3, 155-166. <http://irjbs.com/index.php/jurnalirjbs/article/view/1147>

Tulung, Joy Elly, and Dendi Ramdani. 2018. "Independence, Size and Performance of the Board: An Emerging Market Research." *Corporate Ownership & Control*, Volume 15, Issue 2, Winter 2018. <http://doi.org/10.22495/coev15i2c1p6>

